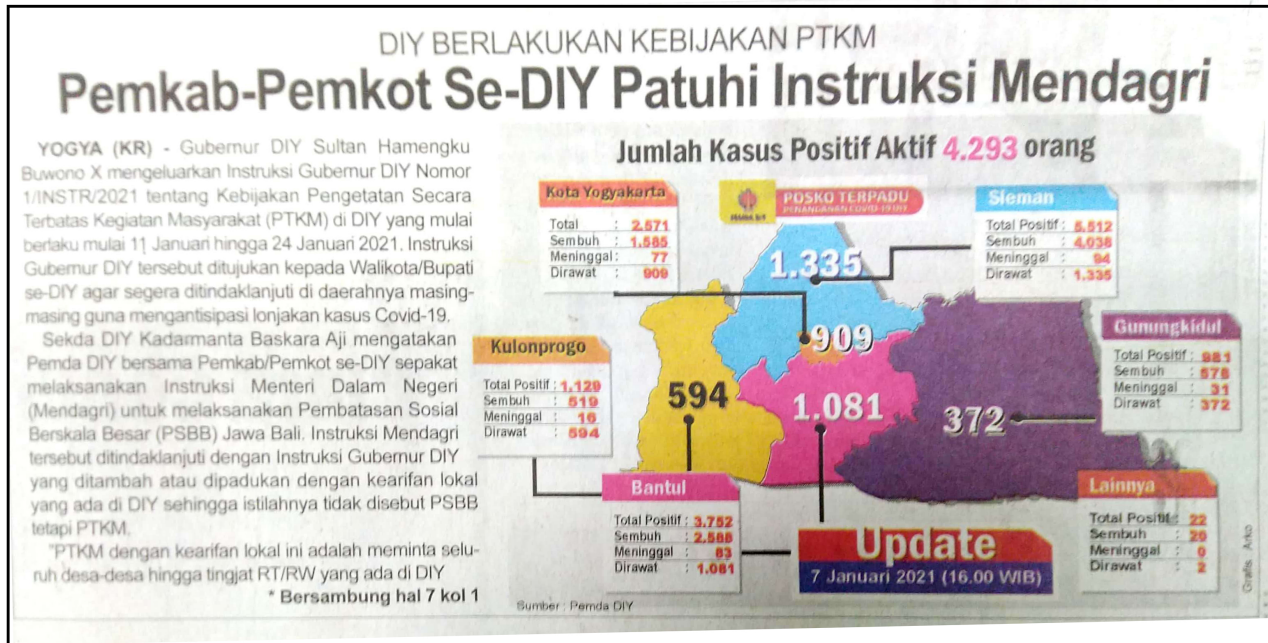




menghidupkan kembali pembatasan seperti awal terjadinya pandemi Covid-19. Tindak lanjut implementasi PTKM tersebut sepenuhnya diserahkan kepada Pemkab/Pemkot se-DIY yang mempunyai kewenangan wilayah," ujar Baskara Aji di Yogyakarta, Kamis (7/1).

Baskara Aji menjelaskan instruksi gubernur tersebut berisikan 8 poin yang intinya pertama pembatasan tempat kerja perkantoran dengan menerapkan 50 persen Work From Home (WFH) dan 50 persen Work From Office (WFO) dengan melaksanakan protokol kesehatan (prokes) dengan ketat. Kedua kegiatan belajar mengajar secara daring jaringan (daring) untuk semua jenjang pendidikan.

"Ketiga, sektor esensial berkaitan dengan kebutuhan pokok boleh beroperasi 100 persen dengan prokes ketat. Selanjutnya keempat, kegiatan restoran hanya diperbolehkan makan di tempat 25 persen dan layanan pesan antar sesuai jam operasional restoran serta pembatasan jam operasi.

rasional pusat perbelanjaan, mal, pasar tradisional dan lain-lain hingga pukul 19.00 WIB," tuturnya.

Kemudian kelima, kegiatan kontruksi diizinkan beroperasi 100 persen dengan penerapan prokes ketat. Keenam, mengizinkan tempat ibadah dibuka dengan kapasitas 50 persen dengan prokes ketat. Ketujuh, meminta seluruh Kepala Daerah Bupati/Walikota di DIY untuk melakukan penerapan disiplin dan penegakan hukum prokes sebagai upaya pencegahan serta pengendalian Covid-19 di wilayah masing-masing.

"Terakhir kedelapan, memerintahkan kepada Pemerintah Desa/Kalurahan untuk melakukan pencegahan Covid-19 di wilayahnya dan menyampaikan pelaksanaan pada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Bapak Gubernur," imbuh Baskara Aji.

Lebih lanjut, Baskara Aji menyampaikan perintah kesiapan pengawasan hingga penegakan hukum sudah dikordinasikan baik TNI/Polri, Satpol PP dan sebagainya sampai kabupa-

ten/kota. Sebab intruksi ini ditujukan kepada kabupaten/kota se-DIY yang mempunyai wilayah.

"Okupansi tempat tidur pasien Covid-19 Rumah Sakit (RS) di DIY sudah mencapai 80 persen dan masuk lima besar nasional penggunaan tempat tidur tertinggi. Belum lagi tren kasus konfirmasi positif di DIY masih tinggi jadi kita sudah tidak bisa main-main lagi dengan menerapkan PTKM ini, sehingga tetap hati-hati supaya semua aman," ungkapnya.

Sebelumnya Wakil Gubernur DIY, KGPAAPaku Alam X didampingi oleh Sekda DIY, Baskara Aji memimpin rapat berkaitan dengan itu. Rapat ini dihadiri oleh Kepala Dinkes DIY, Kepala Pelaksana BPBD DIY, Kominfo Kepala Biro Hukum serta bupati dan wakil serta walikota seluruh DIY secara daring.

"Pembatasan ini bukan pelarangan, tetapi lebih kepada rasionalisasi. Kegiatan yang ada di masyarakat maupun di pemerintahan," ujar Wagub DIY. Sementara itu, Koordinator Tim Pakar dan Juru

Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito mengungkapkan, kasus harian Covid-19 yang mencapai 8.854 telah menimbulkan banyak korban pasien maupun tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, pemerintah mengambil langkah pembatasan kegiatan karena tidak ingin lonjakan kasus harian kembali terjadi. Pemerintah terus berupaya menekan tingginya penambahan kasus harian Covid-19 dengan pembatasan kegiatan masyarakat di Jawa dan Bali pada 11-25 Januari.

"Situasi pandemi di Jawa dan Bali berkontribusi pada peningkatan jumlah kasus secara nasional. Meskipun ada beberapa daerah di luar Jawa dan Bali yang juga berkontribusi terhadap kenaikan kasus. Tapi kita harus lakukan pengendalian agar kasusnya terkendali, tidak timbul korban, dan bisa menjadi modal aktivitas sosial ekonomi ke depan," jelas Wiku dalam talkshow yang difasilitasi melalui akun YouTube BNPB, Kamis (7/1).

Menurut Wiku, meski ada pembatasan tapi bukan

pelarangan. Dengan melakukan pembatasan tersebut, diharapkan kasusnya bisa terkendali dengan cepat. Sehingga bisa kembali stabil, karena masai harus bertahan dalam waktu cukup panjang. Untuk mewujudkan hal itu perlu kesepakatan dengan seluruh lapisan masyarakat.

Di Klaten, Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Luthfi, pihaknya bersama Kodam IV/Diponegoro telah membuat perencanaan operasi yustisi penegakan protokol kesehatan. "Jadi operasi yustisi yang kita maksudkan adalah di situ ada unit sisi lengkap TNI, Polri dan Satpol PP yang dilakukan minimal satu hari tiga kali. Pagi bisa siang bisa sore bisa," ungkap Kapolda saat ditemui usai latihan gabungan di Mako Brimob Kompi 3 Batalyon C Pelopor, Gunung Kendil,

Boyolali pada Kamis (7/1). Beberapa lokasi yang sering terjadi banyak kerumunan akan menjadi titik fokus operasi yustisi. "Operasi yustisi ini dilaksanakan dengan maksud memberikan edukasi kepada masyarakat terkait dengan 3M. Di samping membiasakan masyarakat untuk memutus rantai itu sendiri," terangnya. Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Boyolali, Masruri akan terus mengadakan operasi yustisi yang sudah rutin dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Boyolali di seluruh wilayah. "Untuk penekanan protokol kesehatan dan penegakan pelanggaran disiplin kesehatan," kata Sekda Masruri. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Doni Monardo opti-

mis pelaksanaan Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dapat menekan penyebaran Covid-19. Alasannya, dari momentum pembatasan yang dilakukan pada pertengahan September hingga November tahun lalu telah dapat menurunkan kasus aktif dari 67 ribu menjadi 54 ribu atau turun hingga kurang lebih 20 persen. Dia juga berharap pada periode ini, persentase penurunan angka kasus dapat lebih besar lagi.

"Artinya pengalaman yang lalu ini sekarang kita ulangi kembali lewat pembatasan dan kita harapkan persentasenya bisa lebih besar dibandingkan pada periode September dan November awal. Pada saat itu terjadi penurunan sekitar 20 persen," ujar Doni di Jakarta, Kamis (7/1).

(Ira/Ria/Ati)-1/Slit/Ati)-d

3 Kelompok

Sambungan hal 1

golongan masyarakat secara menyeluruh demi mencapai kekebalan komunitas.

Di sisi lain, Wiku menyatakan, proses vaksinasi akan sulit dilakukan jika terjadi tren peningkatan kasus konfirmasi Covid-19, karena itu perlu diambil langkah untuk

Setelahnya, GAVI akan meninjau ulang keikutsertaan Indonesia untuk bisa mendapatkan kelayakan vaksin gratis dari aksesi vaksin dunia tersebut. Menkes menjelaskan setelah ini akan ada tahapan pemilihan salah satu posisi penting di GAVI yang

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. BPBD			
3. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005